

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholder*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai *agen*. Manajemen merupakan pihak yang dikontak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. (Jensen & meckking 1976) mengemukakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memberi perintah kepada orang lain (*agen*) untuk mengerjakan suatu jasa atas nama prinsip serta memberi kekuasaan kepada para *agen*. Dimana kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka dapat diyakini *agen* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan para *principal*.

Menurut teori keagenan, masalah antara *prinsipal* dan *agen* dapat dikurangi dengan menyamakan kepentingan antara *principal* dan *agen*. Hadirnya kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan sebagai upaya dalam mengurangi *agency cost* yang berpotensi muncul, Karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dikenal dengan *bonding mechanism*, yaitu

proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, masalah kepentingan antara *principal* dengan *agen* salah satunya dapat timbul dengan adanya kelebihan arus kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas biasanya diinvestasikan dalam berbagai hal yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas utama perusahaan. Hal ini menyebabkan perbedaan kebutuhan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang beresiko tinggi dan juga menghasilkan *return* tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan resiko yang lebih rendah. Bathala et al, (1994) menyatakan terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan yaitu;

- a) Menambahkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*)
- b) Menambahkan rasio deviden terhadap laba bersih (*earning after tax*)
- c) Menambahkan pendanaan melalui utang
- d) Kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings*)

Prespektif teori agensi digunakan sebagai dasar untuk mengetahui isu *Good Corporate Governance* dan *Earning Manajemen*. Terdapat pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agen* dalam sebuah organisasi biasanya menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agen*. Jensen dan Meckling (1976) dan Watts Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat mengurangi konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh *agen* sebagai pertanggung jawaban kinerjanya. *Principal* dapat

menilai, mengukur dan mengawasi seberapa jauh agen tersebut bekerja untuk memaksimalkan kesejahteraan serta sebagai pemberian upah kepada *agen*.

Corporate governance adalah konsep yang didasarkan oleh teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan.

2.1.2 Good Corporate governance

Good Corporate Governance adalah suatu sistem (*input, proses, output*) yang didalamnya terdapat seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi untuk tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan cepat. *Konsep Good Corporate Governance* di Indonesia diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik dan terarah. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak para pemegang saham untuk selalu mendapatkan informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* saat ini merupakan suatu upaya agar perusahaan tersebut tetap bertahan dalam persaingan usaha *global*.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Upaya mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan
- b. Upaya pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien
- c. Untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari dalam perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan.
- d. Untuk meningkatkan keikutsertaan perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan investasi nasional
- f. Mensukseskan program privat-isasi perusahaan-perusahaan pemerintah

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam hal ini meliputi :

- a. Transparansi (*Transparency*), yaitu terbukanya informasi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian (*Indepedency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dijalankan secara professional tanpa campur tangan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- c. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga kinerja perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien.
- d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu ketepatan dalam menjalankan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu perilaku adil dan kesamaan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*, yang muncul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Manajemen Laba

Pengertian manajemen laba menurut Schipper (1989) manajemen laba merupakan suatu campur tangan yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan *eksternal*, untuk memperoleh beberapa keuntungan *privat* (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). Aktivitas laba dapat terjadi karena adanya tiga faktor yaitu dengan cara: pemanfaatan transaksi akrual, perubahan metoda akuntansi, dan penerapan kebijakan. Scott (2006: 346-355) berpendapat bahwa beberapa motivasi terjadinya manajemen laba adalah sebagai berikut:

- Motivasi Program Bonus; Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985 dalam Rahmawati dkk, 2006)

- Motivasi Politik : Manajemen laba diterapkan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan biasanya mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang menyebabkan pemerintah menerbitkan peraturan yang lebih ketat.
- Motivasi Perpajakan: Motivasi pengurangan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Beberapa metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan.
- Motivasi Perubahan *Chief Executif Officer (Changes of CEO Motivations)*; CEO menjelang masa pensiun biasanya akan menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan menaikkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
- *Initial Public Offering (IPO)*; Perusahaan yang ingin *go public* belum memiliki nilai pasar, sehingga menyebabkan manajer perusahaan yang ingin *go public* melakukan manajemen laba yang bertujuan menaikkan harga saham perusahaan.
- Motivasi Perjanjian Utang (*Debt Covenants Motivations*); Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Metode dalam manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat dilakukan dengan tiga metode. Yaitu :

- Menggunakan peluang atau melakukan kebijakan untuk membuat perkiraan akuntansi. Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) estimasi akuntansi, Antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
- Mengubah teknik akuntansi. Untuk melakukan perubahan pada angka laba yaitu dengan mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya, Perubahan metode akuntansi tersebut yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi.
- Menggeser periode biaya atau pendapatan. Terdapat beberapa hal untuk menggeser periode biaya atau pendapatan, sebagai contoh memanipulasi periode biaya atau pendapatan, seperti mempercepat atau menunda pengeluaran untuk meneliti dan mengembangkan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

Menurut Abdelghany,2005 aktivitas manajemen laba yang biasa dilakukan perusahaan adalah :

- *Big bath*,dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap biaya dilakukan melalui *one time restructuring charge*. Dimana hal ini dapat berakibat pada perusahaan yang akan mendapatkan pembebanan biaya secara besar-

besaran pada tahun ini, dan memberi dampaknya pada tahun selanjutnya perusahaan akan mengalami profit yang besar.

- *Abuse of Materiality*, yakni dengan mengubah laba dengan penerapan prinsip *materiality*, dimana tidak terdapat tingkatan yang khusus mengenai material atau tidaknya suatu transaksi.
- *Cookie Jar*, yang biasa disebut *rainy jar* atau *contingency reserves* dimana dalam suatu waktu kondisi keuangan yang baik maka perusahaan dapat mengurangi laba melalui pencadangan yang lebih banyak, pembebanan biaya yang lebih besar dan menggunakan satu kali *write offs*. Apabila kondisi keuangan memburuk maka akan dilakukan hal sebaliknya.
- *Round Tripping, back to back and swap*, hal ini dilaksanakan dengan menjual suatu unit usaha kepada perusahaan lain dengan melakukan perjanjian untuk membelinya kembali pada harga tertentu, dimana hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan pemasukan perusahaan.
- *Voluntary accounting changes*, dengan melakukan suatu perubahan kebijakan akuntansi yang biasa digunakan perusahaan.
- *Conservative Accounting*, dilakukan dengan menggunakan teknik akuntansi yang paling akurat seperti ILO dan pembebanan biaya R&D dari pada mengkapitalisasinya.
- *Using the Derivative*, manajer dapat menggunakan memanipulasi laba dengan cara pembelian *instrument hedging*.

2.1.4 Perusahaan Keluarga

Stefan S. Handoyo (2010), mengemukakan bahwa bisnis keluarga atau *family business* merupakan suatu usaha yang dimiliki atau dikelola oleh orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik suami-istri ataupun keturunannya, termasuk hubungan persaudaraan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), persaudaraan dalam keluarga terdapat empat golongan. *Pertama* ialah keluarga dalam garis langsung ke bawah (anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri). *Kedua*, terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas (orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka). *Ketiga* terdiri atas kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas. *Keempat* terdiri dari anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Penggolongan semacam ini lazimnya terkait dengan urutan keutamaan dalam pewarisan.

Prinsip-prinsip dalam perusahaan keluarga :

Pertama, prinsip kejujuran. Lewis Smedes (1983) dalam buku tulisan Alexander Hill berjudul: *Just Business (Christian Ethics for The Market Place)*, mengemukakan bahwa kejujuran (dalam bisnis) penting untuk tiga alasan, yaitu membangun kepercayaan, mengembangkan masyarakat, dan melindungi martabat. Tanpa hadirnya komunikasi yang jujur dalam menjalankan bisnis keluarga, kepercayaan itu tidak mungkin ada. Kejujuran juga berlaku terhadap siapa saja, baik di dalam internal ataupun eksternal keluarga. Kejujuran di dalam internal keluarga menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun suatu bisnis keluarga.

Kedua, prinsip keadilan. Seorang direksi, atau staf, atau karyawan perusahaan yang tiba-tiba diberhentikan (dipecat) oleh pemilik perusahaan (*owner*) tanpa penjelasan yang jelas dari pihak manajemen, dan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, merupakan tindakan yang tidak adil. Pemecatan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk perampasan hak sosial dan ekonomi pekerja. Demikian pula perlakuan diskriminatif manajemen perusahaan terhadap para pekerjanya, baik dalam hal karir maupun upah. Jika negara telah berlaku adil terhadap pengusaha dan pekerja dalam bentuk kebijakan dan hukum ketenagakerjaan maka pengusaha pun wajib mengimplementasikan prinsip keadilan itu kepada para pekerjanya. Misalnya, Upah Minimum Kota (UMK) merupakan standar minimum dari pemerintah, namun perusahaan sudah sepatutnya memberi upah dengan standar optimum dengan tetap memperhitungkan produktivitas pekerja.

Ketiga, *prinsip kelestarian lingkungan hidup*. Alexander Hill juga menggaris bawahi pentingnya tanggung jawab pebisnis terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Pemilik perusahaan tidak seharusnya berpikiran bahwa selama kegiatan bisnis mereka tidak memberi ancaman kepada masyarakat, pemilik bisnis bebas menggunakan tanah dengan semaunya. Jika terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, demi keadilan, perusahaan yang menyebabkannya membayar kompensasi atau ganti rugi yang wajar, termasuk kepada masyarakat yang terkena dampaknya

Keempat, prinsip keselamatan konsumen. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang me-rusak kesehatan wajib pula memberikan penggantian yang wajar kepada konsumen yang memakainya.

2.1.5 Komisaris Indenpenden

Komisaris indenpenden adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak indenpenden atau ber-tindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance 2004). Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Indenpenden adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independent menjadi peting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Fama dan Jensen (dalam Ujijanto dan Pramuka, 2007) mengemukakan bahwa komisaris indenpenden dapat melakukan tindakan sebagai pengantara dalam konflik yang terjadi diantara para manajer internal dan monitoring kebijakan manejemen serta memberikan nasihat kepada para manajer. Komisaris indenpenden merupakan salah satu posisi terbaik dalam upaya melakukan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) memutuskan beberapa ukuran untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang terkait.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya pada perusahaan yang terkait.
- Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang terkait.
- Tidak menjabat sebagai eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
- Tidak menjadi partner atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- Tidak ikut campur dari segala kegiatan bisnis atau hubungan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
- Mengerti peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal, dan UU serta peraturan lain yang terkait.
- Tidak pernah melakukan tindak pidana apapun yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Tugas utama komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi, dimana tugas pengawasan meliputi :

- i. Pengawasan *preventif*, memiliki tujuan untuk menjaga agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan perseorangan yang dilakukan oleh direksi.
- ii. Pengawasan represi, agar dapat mengontrol tindakan direksi. Apakah tindakan yang telah dilakukan oleh direksi tidak merugikan perusahaan atau tidak bertentangan dengan akta pendirian atau anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku, serta semua yang sudah ditentukan dalam rups telah dijalankan. Apabila direksi dasar atau undang-undang ataupun keputusan rups maka dapat diberhentikan untuk sementara (*geschort*), namun apabila membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dapat diangkat kembali

2.1.6 Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman, 1995). Sesuai dengan kep.29/PM/2004 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Kehadiran komite audit memiliki peranan penting dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan bagian baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite

audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dengan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Dalam Kep-29/PM/2004 perusahaan diwajibkan membentuk komite audit, tugas komite audit diantaranya:

- Melaksanakan peninjauan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- Melaksanakan peninjauan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- Melaksanakan peninjauan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor *internal*.
- Memberikan laporan kepada komisaris semua resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
- Memberikan peninjauan dan memberikan laporan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada *independensi*, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah perbandingan saham biasa yang dimiliki oleh manajemen (direksi dan komisaris). Kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap pencapaian manajemen. Semakin banyak kepemilikan manajerial, maka manajemen akan semakin memiliki tanggung jawab dalam upaya memenuhi keinginan manajemen. Termasuk kepentingan dirinya sendiri (Bridgham dan Husron 2009;27-30).

Salah satu indikator dalam manajemen laba ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Perbedaan motivasi akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, contohnya seperti manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005).

2.1.8 Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institutional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner et al, 2003). Adanya pemegang saham seperti institutional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institutional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Sartono, 2010:13).

Signifikansi institusional ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku institusional ownership dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan.

2.2 Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian oleh Larastomo dkk (2016) menyatakan bahwa secara menyeluruh dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan *tax avoidance* berpengaruh terhadap manajemen laba.
- b. Penelitian oleh Wahyono (2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *corporate governance* terhadap kegiatan manajemen laba yang terjadi di perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana ditemukan bahwa indeks *corporate governance* dengan proksi dewan komisaris, komite audit, manajemen dan *shareholder* yang dihasilkan mengarah pada pelaksanaan yang moderat, dan dapat diartikan penskoran indeks *corporate governance* menghasilkan *presentase* sebesar 51% secara

rata-rata untuk mencegah terjadinya tindakan manajemen laba di perusahaan perbankan Indonesia.

c. Penelitian oleh Marsha dan ghozali (2017). Membuktikan bahwa ukuran komite audit menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif yaitu dapat mengurangi praktik manajemen laba. Rapat komite audit juga menunjukkan arah negatif, jumlah pertemuan anggota komite audit yang lebih banyak akan mengungkapkan manajemen laba. KAP, rapat dewan komisaris dan kepemilikan saham instutional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

d. Penelitian tentang oleh Wahidahwati dan Fadjrih (2014) Membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan managerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial bisa meningkatkan kualitas dari proses pelaporan keuangan. Ketika manager memiliki porsi kepemilikan,

mereka akan bertindak sama seperti pemegang saham umumnya dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan mengungkapkan kondisi riil perusahaan. Kosentrasi kepemilikan, komposisi komite audit dan komisaris independen menunjukkan hasil yang positif, yang artinya tidak mengurangi praktik manajemen laba pada industri perbankan.

- e. Penelitian oleh Qi dan Tian(2012) membuktikan bahwa karakteristik komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ditemukan bahwa ukuran independensi dan frekuensi rapat komite audit memengaruhi tindakan manajemen laba yang dapat berdampak terhadap kualitas dari laporan keuangan perusahaan.
- f. Penelitian oleh Prabaningrat dan Widanaputra (2015) membuktikan bahwa *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen pada penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik pada manajemen laba. Semakin tinggi tingkat pengawasan komisaris independen pada kinerja perusahaan, maka semakin kecil pula kemungkinan para manajemen melakukan manipulasi laba pada laporan keuangan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Dewan komisaris dalam pernyataan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2006 menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan telah melaksanakan praktik *corporate governance*. Penelitian is'ada (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif(mengurangi) manajemen laba. Penelitian rafdan dan prastiwi (2013)

menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, komisaris independen dapat menjadi alat monitoring dan pengendali manajemen perusahaan untuk meminimalisir praktek manajemen laba sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Penelitian nurlis (2016) menyatakan komisaris independen secara signifikan mempengaruhi manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Komisaris independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba

Komite audit merupakan anggota perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komite audit pada penelitian ini didasarkan pada jumlah presentase yang diukur berdasarkan anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit. Penelitian Klein (2000) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit *independen* melaporkan laba dengan kandungan akrual *diskresioner* yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit *independen*. Penelitian iqbal dan facriyah (2007) menunjukkan secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H2 : Komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba

Struktur kepemilikan managerial merupakan jumlah saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yaitu direksi dan manajemen. Penelitian mahariana dan ramantha (2012) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif pada manajemen laba. Hasil ini dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan kepemilikan saham oleh manager dalam perusahaan akan mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan secara maksimal dan memotivasi manager dalam bertindak agar lebih berhati-hati, karena mereka ikut bertanggung jawab atas resiko dari setiap tindakan yang dilakukannya. Penelitian kusumawardhani (2012) menyatakan secara parsial kepemilikan managerial dan ukuran perusahaan tinggi maka manajemen cenderung tidak melakukan manajemen laba. Penelitian vince ratnawati, mohammad ali abdul hamid, oluwatoyin muse jhonson popola (2016) menyatakakan bahwa kepemilikan managerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, berdasarkan temuan itu maka disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan managerial maka akan menurunkan kemungkinan praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3: Struktur kepemilikan managerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba

Struktur kepemilikan institusional merupakan jumlah presentase hak suara yang dimiliki institusi lembaga keuangan non bank (perusahaan investasi, asuransi, reksadana) yang mengelola dana atas nama orang lain. Penelitian indriastuti (2012) menyatakan kepemilikan managerial mempunyai pengaruh negatif (mengurangi) dan signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian

darwis(2012) menyatakan variabel moderating kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan nilai perusahaan. Pihak institusional dapat mengontrol perusahaan dengan teliti sehingga manager melakukan manajemen laba dapat dikurangi. Penelitian nurlis (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini terjadi karena dengan kepemilikan modal dari lembaga di luar perusahaan dalam struktur modal akan meningkatkan pengawasan dilakukan oleh investor institusi untuk pengawasan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H4 : Struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba

2.4 Kerangka pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya serta kuat lemahnya hubungan antara variabel dependen berupa manajemen laba dengan variabel independen berupa komisaris independen, komite audit, struktur kepemilikan managerial dan struktur kepemilikan institusional.

Gambar 2.1

